



PROVINSI BENGKULU

KAMIS, 28 NOVEMBER 2019

SUMBER BERITA

	RAKYAT BENGKULU		MEDIA INDONESIA
X	BENGKULU EKSPRESS		KOMPAS
	RADAR BENGKULU	

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF
 NETRAL
 BAHAN PEMERIKSAAN
 PERHATIAN KHUSUS

Dua Kasus Korupsi Ditargetkan Segera Tuntas

BENGKULU, BE-Kejaksanaan Tinggi (Kejati) Bengkulu sampai saat ini masih melengkapi bukti kasus korupsi proyek multiyears pembangunan penahan abrasi pantai di Desa Pasar Ipuh, Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko tahun 2017-2018, dan pembangunan irigasi Air Cendam Bawah Kabupaten Lebong.

Kepala Kejaksanaan Tinggi (Kajati) Bengkulu, Amanda Syah Arwan SH MH melalui Kasi Penkum, Marthin Luther SH MH mengatakan, pengusutan terus dilakukan penyidik pidsus Kejati Bengkulu. Sejumlah saksi yang berkaitan dan mengetahui kasus korupsi tersebut dimintai keterangan untuk menambah bukti.

Seperti dari dinas PU Kabupaten Lebong untuk kasus korupsi irigasi dan pejabat Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWSS) VII Provinsi Bengkulu untuk kasus korupsi penahan abrasi pantai.

Kejati mantargetkan akhir tahun nanti kasus tersebut bisa tuntas.

"Sejumlah saksi masih diperiksa untuk menambah bukti," jelas Kasi Penkum, kemarin (27/11).

Karena masih memeriksa saksi, kerugian negara dari dua kasus korupsi tersebut belum ada yang keluar. Hanya saja, untuk kasus korupsi penahan abrasi pantai Ipuh, beberapa waktu lalu pidsus Kejati Bengkulu memperkirakan kerugiannya Rp 2 miliar berdasarkan penelitian sampel dari tim ahli saat cek fisik.

Diduga pihak Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWSS) VII Provinsi Bengkulu mensubkontrakkan proyek tersebut. Atau, selaku pemenang lelang proyek, BWSS VII memberikan subkontraktor kepada 4 perusahaan.

Empat perusahaan yang ditunjuk tersebut kemudian menyuruh pihak lain mengerjakan proyek tersebut. Cara tersebut sudah melanggar peraturan presiden nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah sebagaimana diubah dengan peraturan presiden nomor 4 tahun 2015 yang menyebutkan proyek pekerjaan mayor tidak boleh disubkontrakkan kepada pihak lain, artinya kontraktor harus sepenuhnya mengerjakan sendiri proyek tersebut.

"Yang pasti kita masih melengkapi bukti, siapa saja yang terlibat menunggu hasil perhitungan kerugian negara," isi Penkum.

Kasus korupsi pembangunan irigasi naik ke penyidikan berdasarkan bukti yang sudah didapatkan melalui cek fisik dan ketepatan penyidikan. Kejati Bengkulu bersama tim ahli melakukan cek fisik lapangan ditemukan dikasi pelanggaran pengerjaan irigasi diduga pelanggaran terlihat dari jalur saluran air irigasi tidak mengganga pembuatan pemukiman air irigasi.

Terkait volume pekerjaan, Aspidsus mengaku belum mengklarifikasi secara rinci, sehingga belum bisa memastikan apakah sesuai spek atau tidak proyek tersebut. (167)